

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa dukungan Tiongkok terhadap Palestina pada periode 2021–2025 merupakan manifestasi rasional dari kepentingan nasional Tiongkok yang didefinisikan dalam terminologi kekuasaan, sebagaimana dirumuskan Hans J. Morgenthau. Dalam konteks rivalitas sistemik dengan kekuatan Barat khususnya Amerika Serikat Tiongkok tidak lagi memandang kepentingan nasional semata-mata melalui dimensi kekuatan material (militer dan ekonomi), melainkan juga melalui kekuasaan normative yaitu kemampuan memperoleh prestise, otoritas moral, dan legitimasi global sebagai fondasi status kekuatan besar yang bertanggung jawab.

Langkah pertama dalam misi ini adalah membangun prestise atau citra sebagai aktor yang konsisten dan dapat dipercaya. Tiongkok mencapainya melalui konsistensi di forum multilateral, terutama Dewan Keamanan PBB, di mana ia berulang kali menggunakan veto atau abstain terhadap resolusi yang dianggap bias terhadap Israel. Tindakan ini bukan sekadar penolakan, melainkan pernyataan prinsip bahwa keadilan global harus berlaku tanpa standar ganda. Dukungan dari negara-negara Global South yang terlihat dari peningkatan preferensi publik di Yordania (+16 poin), Maroko (+16), dan Tunisia menjadi bukti bahwa strategi ini efektif. Tiongkok tidak hanya berbicara, tetapi dipercaya. Dan ketika sebuah negara dipercaya sebagai wasit yang adil, ia secara alami mendapatkan ruang untuk memimpin reinterpretasi aturan global bukannya hanya mengkritik dari luar. Namun, prestise saja tidak cukup tanpa otoritas moral yaitu kapasitas untuk diyakini sebagai penjaga nilai universal seperti keadilan dan hak menentukan nasib sendiri. Di sinilah Tiongkok menggabungkan narasi dan aksi retorika, penolakan eksplisit untuk menyebut Hamas sebagai teroris, bantuan kemanusiaan yang disalurkan secara selektif dan juga penolakan terhadap Gaza Humanitarian Foundation yang dipimpin AS. Dengan menawarkan jalur alternatif yang menekankan netralitas dan

non-intervensi, Tiongkok tidak hanya memberi bantuan ia menantang legitimasi moral AS sekaligus menawarkan narasi yang lebih resonan bagi negara-negara yang selama ini merasa termarginalkan. Dalam dunia yang skeptis terhadap universalisme AS, otoritas moral bukan hanya asset ia adalah daya tarik struktural. Hasil dari dua pilar ini adalah legitimasi yakni pengakuan eksplisit bahwa Tiongkok bukan lagi penonton, melainkan pemain esensial dalam penyelesaian isu global. Ini tercapai ketika faksi-faksi Palestina yang selama ini bermusuhan termasuk Fatah dan Hamas memilih Tiongkok sebagai mediator netral dalam Beijing Declaration, ketika posisi Tiongkok didukung oleh koalisi kuat seperti BRICS dan OKI dan ketika isu Palestina secara resmi diintegrasikan ke dalam Global Security Initiative (GSI) sebagai bagian dari solusi perdamaian. Legitimasi ini memberi Tiongkok akses ke meja perundingan tertinggi, pengaruh dalam pembentukan agenda multilateral, dan yang paling penting kapasitas untuk mendefinisikan ulang apa artinya menjadi kekuatan besar yang bertanggung jawab di abad ke-21.

Oleh karena itu, dukungan Tiongkok terhadap Palestina pada 2021–2025 merupakan perwujudan konkret dari kepentingan nasional yang didefinisikan dalam terminologi kekuasaan normative sebuah strategi low-cost, high-impact untuk membangun fondasi tatanan internasional multipolar yang mencerminkan visi dan nilai-nilai Tiongkok, sekaligus memposisikannya sebagai rival ideologis dan pemimpin alternatif yang sah bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia.

5.2 Saran

Mengenai penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran untuk penelitian yang akan datang, khususnya terkait strategi dalam menghadapi tantangan dalam penguatan legitimasi normatif Tiongkok di tengah rivalitas geopolitik global. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memperdalam pemahaman mengenai batas-batas efektivitas normative power Tiongkok terutama ketika retorika moral tidak selaras dengan tindakan nyata (misalnya dalam isu Xinjiang, Tibet, atau Laut China Selatan), yang berpotensi melemahkan kredibilitas jangka panjangnya sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab. Selain itu diharapkan untuk penelitian mendatang menggunakan pendekatan teoritis yang berbeda.

Penelitian ini berfokus pada kerangka kepentingan nasional dalam terminologi kekuasaan normatif menurut Hans J. Morgenthau, dengan penekanan pada dimensi prestise, otoritas moral, dan legitimasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan temuan ini dengan mengguakan kerangka teori, objek dan pengamatan yang berbeda.

